



EVALUASI RENCANA KERJA (EVALUASI RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG**



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Jl. Cut Mutia No. 44 B Telukbetung Utara
Telp./Fax. (0721) 470305 Bandar Lampung 53211
Email: disperindag@lampungprov.go.id



Kata Pengantar

Alhamdulillah hirobbil alamin dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan evaluasi terhadap Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang disusun berdasarkan atas hasil kerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2024 dan sekaligus merupakan pertanggung jawaban Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Dari laporan ini diperoleh gambaran pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2024 serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di tahun berikutnya.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan terima kasih.

Bandar Lampung, Januari 2025.

KEPALA DINAS



Dra. EVI FATMAWATY, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 19690210 199001 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DAN RENSTRA DISPERINDAG.....	5
2.1 Cascading Tujuan dan sasaran Beserta IKU Renstra Disperindag	6
2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra	18
2.3 Persandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra	25
2.4 Persandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan DPA	37
BAB III CAPAIAN KINERJA DISPERINDAG	52
3.1 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Renja Disperindag Tahun 2024	50
3.2 Capaian Kinerja IKU Disperindag Tahun 2024	94
BAB IV PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	96
4.1 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja.	96
4.2 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja.	96
4.3 Rekomendasi Kebijakan.	97
BAB V PENUTUP.	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat akan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka untuk itu perlu disusun Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024.

Salah satu azas dalam penyusunan evaluasi renja adalah azas akuntabilitas yaitu asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah antar provinsi sebagaimana dimaksud, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud, mencakup perumusan visi dan misi serta serta sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD provinsi masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin perumusan:

- a. Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi masing-masing;
 - c. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya;
 - d. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan RTRW provinsi lainnya;
 - e. Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
 - f. Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi.
4. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, telah mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW provinsi masing-masing, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

1.2. Dasar Hukum.

- a. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- b. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di sektor perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD maksud dan bertujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Maksud dan tujuan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada “Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan, meningkatkan perdagangan luar negeri serta andil inflasi bahan makanan di Provinsi Lampung”. Tujuan pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Meningkatkan nilai perdagangan luar negeri merupakan sektor utama penopang perekonomian provinsi lampung. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah nilai ekspor non migas terhadap PDRB.
 - b. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB.
 - c. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan agar menjadi sektor utama penopang perekonomian provinsi lampung. Indikator kinerja dari sasaran

strategis ini adalah persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

2. Andil inflasi bahan makanan. Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya menjaga stabilitasi harga bahan pangan pokok penting untuk melihat laju perubahan harga rata-rata bahan pangan pokok di pasaran, komoditi yang dominan memberikan andil dalam pembentukan inflasi bahan makanan.

BAB II
PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN
PADA RENJA DENGAN RENSTRA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Program pembangunan pada Renstra yang dituangkan dalam Renja tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terdapat 9 Program, 21 Kegiatan dan 55 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.35.506.967.723,- yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun 2024 program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebanyak 9 Program, 19 Kegiatan dan 45 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.26.237.953.444,- yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga terdapat 2 Kegiatan dan 7 Sub kegiatan Renstra yang tidak dilaksanakan pada tahun 2024.

Dibawah ini kami sajikan dalam tabel Persandingan Renstra dengan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 beserta tujuan, sasaran, indikator sasaran, target indikator sasaran, indikator program dan kegiatan, target kinerja program kegiatan, dan pagu pendanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

2.1. Cascading Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
Menjaga Stabilitas Harga	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil Inflasi bahan makanan	5-6,5 %	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	5,5%	520.000.000		916.000.000
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan harga melalui sistem informasi	12	390.000.000		841.000.000
				1 Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota	Jumlah laporan pergerakan harga bahan pokok serta barang strategis	1	90.000.000	12	91.000.000
				2 Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan stabilisasi harga pangan pokok	7	300.000.000	1	750.000.000
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat daerah Provinsi melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.	Persentase Kinerja realisasi pupuk	90%	90.000.000		75.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
				1 Pengawasan, Penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90% (laporan)	8	90.000.000		75.000.000
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					75.000.000
				Pembangunan dan Pegelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		1	40.000.000		75.000.000
				Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Penggunaan pasar lelang komoditas yang berpartisipasi	1	40.000.000	75	75.000.000
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migas		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		10	750.000.000		556.400.000
				Penyelenggaraa Npromosi dagang melalui pameran dagangn dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam provinsi	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasiitasi promosi dagang	45	750.000.000		556.400.000
				1 Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	17	125.000.000	5	556.400.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
						(produk)				
	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan sektor perdagangan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase cakupan barang beredar yang diawasi	20%	1.095.000.000		1.000.720.000
					Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen	3	125.000.000		300.000.000
				1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah BPSK yang aktif	1	75.000.000	1	300.000.000
					Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu	1%	670.000.000		620.720.000
				1	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensi yang dipantau (komoditi)	14	70.000.000	6	320.417.000
				2	Pengembangan Layanan pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	4	250.000.000	12	179.483.000
				3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	1.955	275.000.000	1250	54.183.000
				4	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	50	75.000.000	5	66.637.000
					Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan	20 %	300.000.000		80.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
				1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawaso (laporan)	35	225.000.000		50.000.000
				2 Fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah kasus yang di tangani (kasus)	1	75.000.000		30.000.000
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM/PKM unggulan/Potensi yang memperoleh fasilitasi pemasaran		1.025.000.000		375.000.000
				Pelaksanaan promosi produk dalam negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan	20%	1.000.000.000		275.000.000
				1 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersetaraan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri (UKMKM)	15	1.000.000.000	40	275.000.000
				Pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan	20%	250.000.000		100.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
				1	Fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Provinsi	250	150.000.000		100.000.000
	Meningkatkan pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	200	7.085.000.000		5.313.513.500
					Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	90%	6.660.000.000		5.313.513.500
				1	Penyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1	630.000.000	1	150.000.000
				2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran perwilayahan industri	1	4.000.000.000		347.036.000
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan sumber daya industri	3	875.000.000	3	1.197.880.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
						sumber daya industri (dokumen)				
				4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3	225.000.000	1	450.400.000
				5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	3	1.475.000.000	2	3.124.202.500
				6	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri (dokumen)	1	85.000.000	1	43.995.000
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	25%	260.000.000		175.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar	20	260.000.000		175.000.000
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sector Perindustrian yang menjadi wewenang Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha industry dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industry besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang ushaa tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	7	125.000.000	1	100.000.000
				2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sekor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui SIINas yang terintegrasi dengan system OSS RBA	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko usaha menengah-tinggi dan	1	135.000.000	1	75.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
					tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan system OSS RBA				
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	45%	165.000.000		93.995.000
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri	12	165.000.000		93.995.000
				1 Diseminasi dan Publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui SIINas	2	125.000.000	1	50.000.000
				2 Pemantauan dan Evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas (dokumen)	1	40.000.000		43.995.000
				PENUNJANG					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20.048.745.539		17.732.324.943
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	95%	19.831.492.349		339.060.000
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	9	150.000.000	9	267.656.000
				2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	5	130.000.000	5	71.404.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi keuangan	100	15.686.492.539		12.951.712.346
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	15.521.492.349	92	12.876.712.346
				2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan verifikasi keuangann	12	70.000.000	12	25.000.000
				3 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1	45.000.000	1	25.000.000
				4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12	50.000.000	12	25.000.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi kepegawaian	100	95.000.000		150.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
				1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat	30	75.000.000	30	150.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian sub kegiatan	95	1.642.253.000		1.551.642.597
				1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerbangan bangunan kantor	73	45.000.000	1	35.000.000
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	590	325.000.000	1	575.938.597
				3	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	75	47.253.000	1	10.000.000
				4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	250.000	60.000.000	1	35.000.000
				5	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/ material yang tersedia	2	150.000.000	2	149.000.000
				6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	40.000.000	17	50.000.000
				7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi	40	975.000.000	35	696.704.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
				Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi BMD	100	50.000.000		50.000.000
				1 Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan BMD pada PD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan BMD pada PD	2	25.000.000	2	25.000.000
				2 Penatausahaan BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1	25.000.000	1	25.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95	1.575.000.000		1.801.800.000
				1 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	100	475.000.000	1	250.000.000
				2 Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.100.000.000	12	1.551.800.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan	15	720.000.000	0	888.110.000
				1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9	425.000.000	12	578.110.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
				2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	2	225.000.000		270.000.000
				3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarpras Yang terpelihara	50	70.000.000	53	40.000.000
JUMLAH								31.213.145.539		26.237.953.443

2.2. Persandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2024 dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2019-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA 2024	KETERANGAN
1	2	3	4
SASARAN UTAMA			
A	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
I	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
1	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Konsisten
B	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
II	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	
2	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Konsisten
3	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsisten

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA 2024	KETERANGAN
1	2	3	4
III	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
4	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Konsisten
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Konsisten
C	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
IV	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	
6	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Pameran Dagang Internasional/Nasional	In Konsisten
7	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	In Konsisten
D	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
V	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
8	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Konsisten
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	In Konsisten
VI	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA 2024	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Verifikasi Mutu Produk	Verifikasi Mutu Produk	Konsisten
11	Pengembangan Layanan pengujian	Pengembangan Layanan Pengujian	Konsisten
12	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Konsisten
13	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Konsisten
VII	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
14	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Konsisten
15	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Konsisten
E	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
VIII	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
16	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	In Konsisten
IX	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
17	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Konsisten
18	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	In Konsisten

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA 2024	KETERANGAN
1	2	3	4
F	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
X	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
19	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Konsisten
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Konsisten
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Konsisten
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Konsisten
23	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Konsisten
G	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
XI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
24	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan	In Konsisten

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA 2024	KETERANGAN
1	2	3	4
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	In Konsisten
H	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
XII	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis (SIINAS)	
26	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Konsisten
27	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Konsisten
SASARAN PENDUKUNG			
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
XIII	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
28	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Konsisten
29	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsisten
XIV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Konsisten
30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Konsisten

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA 2024	KETERANGAN
1	2	3	4
31	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Konsisten
32	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Konsisten
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Konsisten
XV	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	
34	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Konsisten
35	Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Konsisten
XVI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
36	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Konsisten
XVII	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
37	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Konsisten
38	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsisten
39	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Konsisten
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Konsisten
41	Penyediaan bahan/material	Penyediaan Bahan/Material	Konsisten
42	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsisten
43	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsisten

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA 2024	KETERANGAN
1	2	3	4
XVIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Konsisten
45	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Konsisten
XIX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
46	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Konsisten
47	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Konsisten
48	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Konsisten

2.3. Persandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2024 dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2019-2024

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SASARAN UTAMA							
A	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				75.000.000		
I	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				75.000.000	1	40.000.000
1	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah penggunaan pasar lelang komoditas yang berpartisipasi	Orang	75	75.000.000	1	40.000.000
B	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				916.000.000	5,5%	520.000.000
II	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan				841.000.000	12	390.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	jumlah Laporan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota	Laporan	12	91.000.000	1	90.000.000
3	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah lampung	laporan	1	750.000.000	7	300.000.000
III	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				75.000.000	90%	90.000.000
4	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan		75.000.000	8	90.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				556.400.000	10	750.000.000
IV	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi				556.400.000	45	750.000.000
5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Produk	5	556.400.000	17	125.000.000
D	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.000.720.000	20%	1.095.000.000
V	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000	3	125.000.000
6	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang aktif	BPSK	1	300.000.000	1	75.000.000
VI	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				620.720.000	1%	670.000.000
7	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi Potensial yang dipantau	Produk	6	320.417.000	14	70.000.000
8	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	Laporan	12	179.483.000	4	250.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Pengembangan Layanan Sertifikasi Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat produk yang diterbitkan	Sertifikat	1250	54.183.000	1955	275.000.000
10	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	Sertifikat	5	66.637.000	50	75.000.000
VII	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000	20 %	300.000.000
11	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	Laporan		50.000.000	35	225.000.000
12	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah kasus yang Ditangani	Kasus		30.000.000	1	75.000.000
E	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				375.000.000		1.025.000.000
VIII	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				275.000.000	20%	1.000.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan pameran produk dalam negeri	UMKM	40	275.000.000	15	1.000.000.000
17	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				100.000.000	20%	250.000.000
14	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Laporan		100.000.000	250	150.000.000
F	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				5.313.513.500	200	7.085.000.000
IX	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				5.313.513.500	90%	6.660.000.000
15	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri provinsi	Dokumen	1	150.000.000	1	630.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran, dan perwilayahan industri	Dokumen		347.036.000	1	4.000.000.000
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Dokumen	3	1.197.880.000	3	875.000.000
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	450.400.000	3	225.000.000
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	3.124.202.500	3	1.475.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Dokumen	1	43.995.000	1	85.000.000
G	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				175.000.000	25%	260.000.000
X	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				175.000.000	20	260.000.000
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sector Perindustrian yang menjadi wewenang Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha industry dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah yang lokaisnya lintas kab/kota, dan industry besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	100.000.000	7	125.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sekor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui SIINas yang terintegrasi dengan system OSS RBA	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan system OSS RBA	Dokumen	1	75.000.000	1	135.000.000
H	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				93.995.000	45%	165.000.000
XI	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis (SIINAS)				93.995.000	12	165.000.000
23	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan punlikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui SIINas	Dokumen	1	50.000.000	2	125.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	Dokumen		43.995.000	1	40.000.000
SASARAN PENDUKUNG							
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				17.732.324.943	100%	20.048.745.539
XII	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				339.060.000	95%	19.831.492.349
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	9	267.656.000	9	150.000.000
26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi PD	Dokumen	5	71.404.000	5	130.000.000
XIII	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.951.712.346	100	15.686.492.539
27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	92	12.876.712.346	12	15.521.492.349

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	25.000.000	12	70.000.000
29	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	25.000.000	1	45.000.000
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	25.000.000	12	50.000.000
XIV	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				50.000.000	100	50.000.000
31	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	25.000.000	2	25.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000
XV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000	100	95.000.000
33	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	150.000.000	30	75.000.000
XVI	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.551.642.597	95	1.642.253.000
34	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	73	45.000.000
35	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	575.938.597	590	325.000.000
36	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	75	47.253.000
37	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	35.000.000	250.000	60.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	Paket	2	149.000.000	2	150.000.000
39	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	17	50.000.000	60	40.000.000
40	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	35	696.704.000	40	975.000.000
XVII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.801.800.000	95	1.575.000.000
41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	100	475.000.000
42	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.551.800.000	12	1.100.000.000
XVIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				888.110.000	15	720.000.000
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak oleh perizinannya	Unit	12	578.110.000	9	425.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit		270.000.000	2	225.000.000
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	53	40.000.000	50	70.000.000

2.4. Persandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SASARAN UTAMA							
A	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				75.000.000		40.000.000
I	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				75.000.000		40.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah penggunaan pasar lelang komoditas yang berpartisipasi	Orang	75	75.000.000	75	40.000.000
B	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				916.000.000		2.253.500.000
II	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan				841.000.000		2.253.500.000
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	jumlah Laporan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota	Laporan	12	91.000.000	1	153.500.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah lampung	laporan	1	750.000.000	1	2.100.000.000
III	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				75.000.000		
4	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan		75.000.000	1	
C	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				556.400.000		225.158.000
IV	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi				556.400.000		225.158.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Produk	5	556.400.000	10	225.158.000
D	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.000.720.000		629.126.900
V	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000		224.281.000
6	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang aktif	BPSK	1	300.000.000	1	224.281.000
VI	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				620.720.000		404.845.900
7	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi Potensial yang dipantau	Produk	6	320.417.000	6	240.904.800
8	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	Laporan	12	179.483.000	12	121.066.100
9	Pengembangan Layanan Sertifikasi Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat produk yang diterbitkan	Sertifikat	1250	54.183.000	1750	38.125.000
10	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	Sertifikat	5	66.637.000	10	4.750.000
VII	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000		

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	Laporan		50.000.000	1	
12	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah kasus yang Ditangani	Kasus		30.000.000	1	
E	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				375.000.000		219.218.000
VIII	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				275.000.000		219.218.000
13	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan pameran produk dalam negeri	UMKM	40	275.000.000	50	219.218.000
14	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				100.000.000		

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Laporan		100.000.000	1	
F	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				5.313.513.500		2.462.066.825
IX	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				5.313.513.500		2.462.066.825
16	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri provinsi	Dokumen	1	150.000.000	1	79.000.000
17	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran, dan perwilayahan industri	Dokumen		347.036.000	1	
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Dokumen	3	1.197.880.000	2	910.572.075

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	450.400.000	1	50.000.000
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	3.124.202.500	2	1.413.554.750
21	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Dokumen	1	43.995.000	1	8.940.000
G	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				175.000.000		109.817.000
X	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				175.000.000		109.817.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sector Perindustrian yang menjadi wewenang Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha industry dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industry besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	100.000.000	1	50.000.000
23	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sekor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui SIINas yang terintegrasi dengan system OSS RBA	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan system OSS RBA	Dokumen	1	75.000.000		59.817.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
H	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				93.995.000		69.930.000
XI	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis (SIINAS)				93.995.000		69.930.000
24	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan punlikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui SIINas	Dokumen	1	50.000.000	1	69.930.000
25	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	Dokumen		43.995.000	1	
SASARAN PENDUKUNG							
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				17.732.324.943		16.802.804.813
XII	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				339.060.000		245.415.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	9	267.656.000	9	174.011.000
27	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi PD	Dokumen	5	71.404.000	5	71.404.000
XIII	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.951.712.346		13.293.942.116
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	92	12.876.712.346	112	13.218.942.116
29	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	25.000.000	12	25.000.000
30	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000
31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XIV	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000
32	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	25.000.000	2	25.000.000
33	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000
XV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000		91.593.600
34	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	150.000.000	20	91.593.600
XVI	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.551.642.597		691.944.097
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000
36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	575.938.597	1	112.445.597

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000
38	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000
39	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	149.000.000	2	124.000.000
40	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	17	50.000.000	50	35.000.000
41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	35	696.704.000	35	340.498.500
XVII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.801.800.000		1.811.800.000
42	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000
43	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.551.800.000	12	1.561.800.000

No.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		DPPA	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XVIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				888.110.000		618.110.000
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak oleh perizinannya	Unit	12	578.110.000	9	578.110.000
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit		270.000.000	1	
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	53	40.000.000	50	40.000.000

BAB III

CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Anggaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2024.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2024 memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD sebesar Rp. 26.237.953.443- (dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari 9 Program, 19 Kegiatan dan 49 Sub kegiatan.

Tetapi pada perjalanannya terjadi optimalisasi pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan APBD Perubahan Anggaran 2024 menjadi Rp.22.811.621.538,- (dua puluh dua miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.21.706.246.545,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 95,15% dengan sisa anggaran saat ini sebesar Rp.1.105.374.993,- (satu miliar seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dari 42 Sub kegiatan.

Berikut uraian realisasi capaian program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2024 :

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	100	81.933.670.811	100	35.413.207.093	100	16.802.804.813	91	15.757.147.428	91	93,78	90,54	15.757.147.428	90,54	19,23		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan (%)	95	987.439.000	75	473.354.622	100	245.415.000	100	243.450.378	100	99,20	100	243.450.378	100	24,65		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	9	531.719.000	9	202.891.922	9	174.011.000	9	172.212.878	100	98,97	9	172.212.878	100	32,39		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen)	5	455.720.000	5	270.462.700	5	71.404.000	5	71.237.500	100	99,77	5	71.237.500	100	15,63		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan (%)	100	66.495.450.441	100	27.112.856.871	100	13.293.942.116	100	12.327.720.643	100	92,73	100	12.327.720.643	100	18,54		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	115	63.023.700.441	24	24.629.076.101	100	13.218.942.116	100	12.253.324.168	100	92,70	100	12.253.324.168	86,96	19,44		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	24	3.144.390.000	24	2.338.952.450	12	25.000.000	12	24.841.700	100	99,37	12	24.841.700	50	0,79		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	4	152.360.000	2	74.882.896	1	25.000.000	1	24.762.300	100	99,05	1	24.762.300	25	16,25		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
3.30.1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	24	175.000.000	24	69.945.424	12	25.000.000	12	24.792.475	100	99,17	12	24.792.475	50	14,17		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi BMD (%)	100	134.000.000	100	82.647.545	100	50.000.000,00	100	49.751.450	100	99,50	100	49.751.450,00	100	37,13		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Pada SKPD (laporan)	4	67.000.000	4	41.164.300	2	25.000.000,00	2	24.906.550	100	99,63	2	24.906.550,00	50	37,17		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.3.6	Penatausahaan BMD Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (laporan)	12	67.000.000	13	41.483.245	1	25.000.000,00	1	24.844.900	100	99,38	1	24.844.900,00	8,33	37,08		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (%)	100	275.000.000	100	178.337.000	100	91.593.600,00	70	70.966.600	70	77,48	70	70.966.600,00	70	25,81		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	78	275.000.000	19	178.337.000	50	91.593.600,00	35	70.966.600	70	77,48	35	70.966.600	44,87	25,81		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	5.447.937.900	100	2.642.424.413	100	691.944.097	97,14	676.894.433	97,14	97,83	97,14	676.894.433	97,14	12,42		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
3.30.1.6.1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (paket)	159	132.000.000	160	62.824.700	1	35.000.000	1	34.995.000	100	99,99	1	34.995.000	0,63	26,51		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (paket)	6	968.070.000	7	845.850.630	1	112.445.597	1	112.369.800	100	99,93	1	112.369.800	16,67	11,61		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan (paket)	354	142.253.000	355	49.957.200	1	10.000.000	1	9.991.600	100	99,92	1	9.991.600	0,28	7,02		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (paket)	12	219.301.000	13	99.255.800	1	35.000.000	1	35.000.000	100	100	1	35.000.000	8,33	15,96		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.6.7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan / Material Yang Disediakan (paket)	2	421.565.000	4	283.619.000	2	124.000.000	2	114.837.200	100	92,61	2	114.837.200	100	27,24		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	115	130.200.000	105	79.400.000	20	35.000.000	16	29.218.000	80	83,48	16	29.218.000	13,91	22,44		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	255	3.434.548.900	125	1.221.517.083	70	340.498.500	70	340.482.833	100	100	70	340.482.833	27,45	9,91		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	6.025.673.470	100	2.910.824.180	100	1.811.800.000	100	1.777.713.214	100	98,12	100	1.777.713.214	100	29,50		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
3.30.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan laporan)	100	1.668.553.470	101	456.054.180	1	250.000.000	1	242.335.214	100	96,93	1	242.335.214	1	14,52		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayananan Umum Kantor Yang Disediakan (laporan)	24	4.357.120.000	24	2.454.770.000	12	1.561.800.000	12	1.535.378.000	100	98,31	12	1.535.378.000	50	35,24		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Yang Dilakukan Pemeliharaan (%)	15	2.568.170.000	15	2.012.762.462	100	618.110.000	66,67	610.650.710	66,67	98,79	66,67	610.650.710	66,67	23,78		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	64	1.527.250.000	30	742.068.382	12	578.110.000	12	570.929.710	100	98,76	12	570.929.710	18,75	37,38		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.9.9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	800.000.000	3	1.151.332.380	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Efisiensi anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.1.9.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	50	240.920.000	96	119.361.700	53	40.000.000	53	39.721.000	100	99,30	53	39.721.000	106	16,49		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
3.30.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Transaksi Dalam Pasar Lelang (%)	25	175.000.000	20	58.539.610	100	40.000.000	100	37.491.000	100	93,73	100	37.491.000	100	21,42		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas (kali)	3	175.000.000	3	58.539.610	100	40.000.000	100	37.491.000	100	93,73	100	37.491.000	100	21,42		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.3.1.3	Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas Yang Berpartisipasi (orang)	200	175.000.000	50	58.539.610	75	40.000.000	75	37.491.000	100	93,73	75	37.491.000	37,50	21,42		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwaktu (%)	5,5	1.763.000.000	5,5	4.071.460.795	100	2.253.500.000	50	2.224.495.030	50	98,71	50	2.224.495.030	50	126,18		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.4.2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Harga Melalui Sistem Informasi (laporan)	12	1.613.000.000	12	4.071.460.795	100	2.253.500.000	100	2.224.495.030	100	98,71	100	2.224.495.030	100	137,91		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
3.30.4.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (laporan)	4	290.000.000	2	192.817.322	12	153.500.000	12	124.875.500	100	81,35	12	124.875.500	300	43,06		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.4.2.2	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (laporan)	2	1.323.000.000	6	3.878.643.473	1	2.100.000.000	1	2.099.619.530	100	99,98	1	2.099.619.530	50	158,7		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.4.3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (%)	90	150.000.000	85	221.732.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.4.3.3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Dengan Realisasi Minimal 90% (laporan)	2	150.000.000	7	221.732.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Efisiensi anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk Unggulan Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang (produk)	40	422.696.000	0	0	100	225.158.000	100	225.143.100	100	99,99	100	225.143.100	100	53,26		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.5.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang (UKM)	170	422.696.000	0	0	100	225.158.000	100	225.143.100	100	99,99	100	225.143.100	100	53,26		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.5.1.4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah Yang Disusun Menjadi Materi Promosi (produk)	20	422.696.000	0	0	10	225.158.000	10	225.143.100	100	99,99	10	225.143.100	50	53,26		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Cakupan Barang Beredar Yang Diawasi (%)	20	3.408.330.000	17,5	410.562.285	100	629.126.900	74,78	619.571.457	74,78	98,48	74,78	619.571.457	74,78	18,18		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6.1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sosialisasi Pengetahuan Tentang Perlindungan Konsumen (kegiatan)	1	254.330.000	4	410.562.285	100	224.281.000	100	219.655.313	100	97,94	100	219.655.313	100	86,37		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6.1.1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	1	254.330.000	2	410.562.285	1	224.281.000	1	219.655.313	100	97,94	1	219.655.313	100	86,37		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
3.30.6.2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu (%)	1	2.238.000.000	1	1.721.551.807	100	404.845.900	124,35	399.916.144	24,35	98,78	124,35	399.916.144	124,35	17,87		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6.2.4	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan (seertifikat)	170	240.000.000	85	250.259.764	10	4.750.000	10	4.736.900	100	99,72	10	4.736.900	5,88	1,97		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6.2.5	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah laporan hasil pengujian mutu barang (laporan)	12	780.000.000	19	859.325.680	12	121.066.100	12	121.018.544	100	99,96	12	121.018.544	100	15,52		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6.2.6	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah komoditi potensial yang dipantau (produk)	6	210.000.000	16	149.505.550	6	240.904.800	11	236.106.100	183,33	98,01	11	236.106.100	183,33	112,43		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6.2.7	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikat produk yang diterbitkan (sertifikat)	7.701	1.008.000.000	3.850	462.460.813	1.750	38.125.000	1.996	38.054.600	114,06	99,82	1.996	38.054.600	25,92	3,78		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6.3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Ketentuan (%)	20	916.000.000	17,5	172.421.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6.3.1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (laporan)	60	726.000.000	36	116.747.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Efisiensi anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
	Perlindungan Konsumen																	
3.30.6.3.2	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus Yang Ditangani (kasus)	2	190.000.000	2	55.674.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Efisiensi anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.7	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM/PKM Unggulan/Potensial Yang Memperoleh Fasilitasi Pemasaran (%)	40	3.318.795.000	40	1.922.420.699	100	219.218.000	100	217.474.426	100	99,20	100	217.474.426	100	6,55		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.7.1	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM Binaan Yang Dipromosikan (%)	20	2.950.000.000	20	1.766.211.799	100	219.218.000	100	217.474.426	100	99,20	100	217.474.426	100	7,37		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.7.1.1	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemesanan Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kepesertaan dan Partisipasi Pada Pameran Produk Dalam Negeri (UMKM)	30	2.950.000.000	40	1.766.211.799	50	219.218.000	50	217.474.426	100	99,20	50	217.474.426	166,67	7,37		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.7.3	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM Binaan Yang Mendapatkan Fasilitasi (%)	20	368.795.000	20	156.208.900	20	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.7.3.5	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan	65	368.795.000	66	156.208.900	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Efisiensi anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
		Stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer (laporan)																
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri di Provinsi (%)	2	29.995.861.000	0,5	15.384.912.326	0,5	2.462.066.825	83,33	2.449.063.004	83,33	99,47	83,33	2.449.063.004	83,33	8,16		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.2.1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Dalam RPIP (%)	90	29.995.861.000	90	15.384.912.326	90	2.462.066.825	83,33	2.449.063.004	83,33	99,47	83,33	2.449.063.004	83,33	8,16		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.2.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (dokumen)	1	630.000.000	0	0	1	79.000.000	1	68.006.200	100	86,08	1	68.006.200	100	107,95		
3.31.2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)	2	11.865.000.000	2	1.680.866.418	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Efisiensi anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (dokumen)	30	2.672.567.000	32	2.957.078.517	3	910.572.075	3	910.572.074	100	100	3	910.572.074	10	34,07		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.2.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	20	9.365.000.000	21	1.737.228.096	2	50.000.000	2	50.000.000	100	100	2	50.000.000	10	0,53		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
	Sarana dan Prasarana Industri	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)																
3.31.2.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	120	5.223.294.000	122	8.821.789.495	2	1.413.554.750	2	1.411.626.730	100	99,86	2	1.411.626.730	1,67	27,03		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.2.1.6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)	1	240.000.000	2	187.949.800	1	8.940.000	1	8.858.000	100	99,08	1	8.858.000	100	3,69		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar Yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait (%)	25	923.569.000	20	398.872.149	25	109.817.000	100	109.742.200	100	99,93	100	109.742.200	100	11,88		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.3.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerbitan Rekomendasi IUI Besar (rekomendasi)	63	923.569.000	63	398.872.149	20	109.817.000	100	109.742.200	100	99,93	100	109.742.200	100	11,88		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	11	429.609.000	12	199.251.924	1	50.000.000	1	49.935.800	100	99,87	1	49.935.800	9,09	11,62		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	12
	Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri																
3.31.3.1.4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi,	2	493.960.000	2	199.620.225	1	59.817.000,00	1	59.806.400	100	99,98	1	59.806.400	50	12,11		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Kab/Kota Yang Masuk SIINAS (%)	45	457.198.000	40	126.296.550	45	69.930.000,00	50	66.118.900	50	94,55	50	66.118.900	50	14,46		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RENSTRA Provinsi Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran RENJA Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Dari Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Masalah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
1	2	3	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
3.31.4.1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Industri (bulan)	12	457.198.000	12	126.296.550	12	69.930.000,00	50	66.118.900	50	94,55	50	66.118.900	50	14,46		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.4.1.2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Dan Publikasi Data Informasi Dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas (dokumen)	2	357.198.000	3	54.733.520	1	69.930.000	1	66.118.900	100	94,55	1	66.118.900	100	132,24		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.4.1.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (dokumen)	2	100.000.000	2	71.563.030	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Efisiensi anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Rata-rata capaian kinerja											87,44	95,15						
Predikat											Tinggi							

Berikut realisasi kinerja program/kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran, akan dijelaskan pada uraian dibawah ini :

1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya meningkatkan persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan agar menjadi sektor utama penopang perekonomian Provinsi Lampung. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor terbesar kedua dalam PDRB Provinsi Lampung secara nasional industri pengolahan merupakan sektor terbesar dalam PDB nasional.

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung dengan target 6,3% dan realisasi sasaran strategis pada tahun 2024 adalah 14,2%, hasil ini menunjukkan bahwa progres capaian dari indikator ini telah mencapai target 100% yang telah ditentukan. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini di dukung oleh kegiatan berikut :

1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan pagu anggaran Rp.2,462,066,825,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.79.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.68.006.200,- (86,08%).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya :

- Rapat pembahasan progress pengembangan Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2024-2024 dan PSN yang akan tertuang dalam Dokumen revisi RPIP Lampung, pada tanggal 19 september 2024 di Aula Disperindag Provinsi Lampung.



- Rapat evaluasi RPIP Provinsi Lampung dengan Biro Perencanaan Kemenperin RI, pada tanggal 25 September 2024 di Aula Disperindag Provinsi Lampung.



- Rapat tim pelaksana updating data dokumen RPIP 2019-2035, pada tanggal 26 November 2024 di Aula Disperindag Provinsi Lampung.



- b. Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.347.036.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen. Sub kegiatan ini mengalami optimalisasi anggaran sehingga tidak terlaksana pada tahun 2024.
- c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.910,572,075,- dengan jumlah target indikator 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.910.572.074,- (100%), sub kegiatan ini telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti :
 - Pelatihan tempat kerja (In Company Trainer) pada tanggal 26 Agustus s.d 1 September 2024 di Arte Hotel Bandar Lampung dengan peserta 20 orang.



- Kegiatan Sosialisasi Registrasi dan Pengawasan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) dari Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), pada tanggal 6-7 November 2024 di Hotel Arnes.



- d. Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan jumlah target indikator 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- (100%), sub kegiatan ini telah melaksanakan sosialisasi dan bimtek pendaftaran sertifikat TKDN-IK bagi industri kecil se provinsi lampung pada tanggal 28-29 november 2024. Di Hotel Arinas Bandar Lampung, yang di hadiri oleh 50 pelaku industri kecil.



- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.1.413.554,750,- dengan jumlah target indikator 2 dokumen dan

realisasi 2 dokumen, sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024. dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.411.626.730,- (99,86%). Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan berupa :

- Bimtek peningkatan kapasitas SDM industry rokok, pada tanggal 5-7 Maret 2024 di Hotel wizh prime bandar lampung;



- Penyerahan bantuan kemasan ke 15 Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dari tanggal 3 Mei 2024 s.d. 6 Juni 2024.



- Pelayanan desain dan cetak kemasan IKM di UPTD IPOK dari tanggal 1 Agustus 2024 – sekarang di kantor pelayanan unit desain dan kemasan UPTD IPOK.



- Menentukan Konsep dasar desain kemasan produk IKM yang akan diberikan sebagai Bantuan di tahun anggaran 2024.



- Penyerahan bantuan kemasan kepada IKM penerima bantuan kemasan di 15 kabupaten/kota, pada tanggal 5 agustus 2024 di kantor UPTD IPOK.



- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri Rokok/Tembakau Provinsi Lampung, dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 November 2024, di hotel Sapphire Boutique Kudus, Provinsi Jawa Tengah.



- f. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.8.940.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.858.000,- (99,08%). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antaranya :

- Rapat koordinasi kabupaten/kota yang belum menyusun PERDA tentang RPIK, pada tanggal 10 Juli 2024 di Aula Disperindag Provinsi Lampung.



- Rapat Evaluasi dalam rangka penyempurnaan Ranperda Dokumen RPIK Kabupaten Lampung Tengah 2022-2042, pada tanggal 13 Agustus 2024 di Aula Disperindag Provinsi Lampung.



- Rapat Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri dalam rangka Sinkronisasi Penyesuaian RPIK Kabupaten/Kota, pada tanggal 10 Desember 2024 di Aula Disperindag Provinsi Lampung.



II. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi, dengan pagu anggaran Rp.109.817.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi wewenang Provinsi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dengan jumlah target indikator 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- (99,87%).

Adapun pengawasan yang telah dilakukan pada bulan oktober sampai dengan november 2024, pada PT. Bintang Lampung Lestari di kota metro dan PT jaya Abadi Tapioka di Kabupaten Lampung Utara.



- b. Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor Perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system OSS RBA. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 59.817.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp.59.806.400,- (99,98%).

- Sub kegiatan ini telah melaksanakan Verifikasi Teknis dari Januari s.d. Juni 2024 ke beberapa perusahaan diantaranya :

1. PT. Bintang Lima Menggala Kab. Tulang Bawang Barat;
2. PT. Sumber Batu Berkah Kab. Lampung Selatan;
3. PT. Indo American Seafoods Kab. Lampung Selatan;



- Melakukan Verifikasi Teknis ke PT. Pesona Sawit Makmur di Kabupaten Way Kanan pada bulan November 2024.



III. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan pagu anggaran Rp.69.930.000,-. Adapun rincian

anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.69.930.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebesar Rp.69.930.000,- (94,55%).
- b. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.43.995.000,- dengan jumlah target indikator 1 dokumen. Sub kegiatan ini mengalami optimalisasi anggaran sehingga tidak dilaksanakan pada tahun 2024.

2. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Pencapaian realisasi target kinerja dalam persentase pertumbuhan sektor perdagangan didukung oleh berbagai macam kegiatan pendukung dari beberapa program dan sumber dana yang berbeda, baik APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 maupun dana APBN melalui dana Dekonsentrasi. Sasaran kinerja yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kontribusi sektor perdagangan merupakan sektor terbesar dalam PDRB Provinsi Lampung maupun dalam PDB Nasional. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB, dengan target 7,2% dan realisasi sasaran strategis di tahun 2024 adalah 7,02%. Hasil ini menunjukkan bahwa progres capaian dari indikator ini telah mencapai target 100% yang telah ditentukan. Program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini berupa:

I. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas, dengan pagu anggaran Rp.40.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.40.000.000,- dengan jumlah target indikator 75 orang dan realisasi 73 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp.37.491.000,- (93,73%), sub kegiatan ini telah melaksanakan beberapa kegiatan di tahun 2024 seperti :

- Sosialisasi Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (Misi Dagang), Melalui E-Lelang Dan Klinik Ekspor Menuju Umkm Lampung Berorientasi Ekspor pada tanggal 3 September 2024 di De Green Hotel Bandar Lampung dengan peserta 35 orang.



- Pasar Lelang Komoditi Agro, pada tanggal 23 september 2024 di De Green Hotel Bandar Lampung.

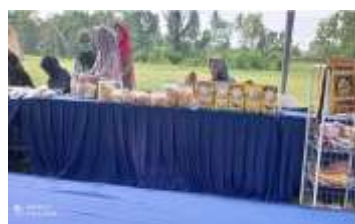


II. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri, dengan pagu anggaran Rp.219.218.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa subkegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.275.000.000,- dengan jumlah target indikator 50 UMKM. Sub kegiatan ini telah melaksanakan kegiatan Bazar Produk UKM/IKM pada tanggal 24 s.d. 29 April 2024 di lapangan korpri kantor Gubernur Lampung

yang di ikuti oleh 100 UKM/IKM, realisasi anggaran sebesar Rp.217.474.426,- (99,20%).



2. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 laporan. Namun kegiatan ini mengalami optimalisasi anggaran sehingga tidak dilaksanakan pada tahun 2024.

III. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp. 224.281.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Pembedayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.224.281.000,- dengan jumlah target indikator 1 BPSK dan realisasi 1 BPSK, realisasi anggaran sebesar Rp.219.655.313,- (97,94%). Sub kegiatan ini pada tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan :
 - Memperingati Hari Konsumen Nasional pada tanggal 26 April 2024 di Lapangan korpri kompleks perkantoran Gubernur Lampung, acara tersebut di ikuti oleh pegawai Pemerintah Provinsi Lampung, Pelaku Usaha (UKM/IKM), pelajar dan masyarakat bandar lampung dengan peserta $\pm$ 1.000 orang.



2. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp.404.854.900,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Pengembangan Layanan Kalibrasi, Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.4.750.000,- dengan jumlah target indikator 10 sertifikat yang terealisasi 12 sertifikat. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.4.736.900,- (99,72%)
- b. Pengembangan Layanan Pengujian, Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.121.066.100,- dengan jumlah target indikator 12 dokumen yang terealisasi 12 dokumen. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.121.018.544,- (99,96%).
- c. Pemantauan Mutu Produk, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.240.904.800,- dengan jumlah target indikator 6 produk yang terealisasi 11 produk. Sub kegiatan ini sudah melakukan sampleing pengujian mutu produk mulai dari januari s.d. desember 2024 di Laboratorium UPTD BPDMB, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.236.106.100,- (98,01%).



- d. Pengembangan Layanan Sertifikasi Lembaga Inspeksi, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.38.125.000,- dengan jumlah target indikator 1750 sertifikat yang terealisasi 1006 sertifikat. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.38.054.600,- (99,82%).
3. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diseluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp.80.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta kegiatan perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan jumlah target indikator 2 laporan. Sub kegiatan ini mengalami optimalisasi anggaran namun ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan seperti :
- Pengawasan terhadap ketersediaan beras dan mengidentifikasi pasokan beras di pasar tradisional, pada tanggal 13 – 16 Februari 2024 di bandar lampung.
-
- Pengawasan terhadap ketersediaan BBM dan Elpiji di wilayah bandar lampung, pada tanggal 7 Maret dan tanggal 06-07 Juni 2024 di bandar lampung.



- Pengawasan terhadap ketersediaan beras dan mengidentifikasi pasokan beras di pasar tradisional, pada tanggal 23 – 24 Februari 2024 di Kabupaten Tanggamus.



- b. Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 kasus. Sub kegiatan ini mengalami optimalisasi anggaran namun tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak Ditkrimsus Polda Lampung pada tanggal 30 -31 Mei 2024 dan tanggal 11 Juni 2024. hukum atau penegakan hukum, melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum.



3. Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri

Salah satu tupoksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pelaksanaan tugas di bidang perdagangan luar negeri. Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya meningkatnya nilai perdagangan luar negeri dengan indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah nilai ekspor non migas. Sasaran ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja ekspor serta meningkatkan kualitas barang ekspor agar dapat bersaing di pasar Internasional agar berkontribusi lebih besar bagi perekonomian Provinsi Lampung pada tahun

2024 capaian ini sebesar 5,6 Miliar US\$. Hasil ini menunjukkan bahwa progres capaian dari indikator selama tahun 2024 adalah 100%, ini menunjukkan bahwa nilai ekspor non migas mendekati pencapaian target sebesar 3,8 Miliar US\$ yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

I. Program Pengembangan Ekspor.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi, dengan pagu anggaran Rp.225.158.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan Citra Produk Ekspor. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.225.158.000,- Jumlah target indikator 10 pelaku usaha dan realisasi 10 pelaku usaha. realisas anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.225.143.100,- (99,99%), beberapa kegiatan pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan seperti :

- Trade Expo Indonesia ke-39 tahun 2024 yang bertujuan untuk Promosi Produk Ekspor, dari tanggal 9 s.d. 12 oktober 2024 di BSD Tangerang Banten dengan jumlah 10 peserta pelaku usaha setiap hari.



- Sosialisasi Persiapan Exsport Coaching Produk, pada tanggal 2 desember 2024 di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang di ikuti oleh 30 peserta pelaku usaha.



Target kinerja pada tahun 2024 untuk nilai perdagangan luar negeri melalui pembinaan dan dukungan bagi pelaku ekspor dengan indikator nilai ekspor non migas adalah sebesar 3,8 Miliar US\$. Nilai ekspor non migas yang dicatat oleh Provinsi Lampung pada tahun 2024 adalah sebesar 5,6 Miliar US\$. Berikut kami sajikan data ekspor non migas Provinsi Lampung :

Tabel 3.4. Data Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Bulan	Nilai Ekspor (Juta US\$)
1	Januari	337.94
2	Februari	434.46
3	Maret	391.14
4	April	331.77
5	Mei	323.25
6	Juni	447,87
7	Juli	447,17
8	Agustus	589.23
9	September	497.02
10	Oktober	723.22
11	November	495.49
12	Desember	569,76
TOTAL Nilai Ekspor		5,588,32

Sumber data : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan table diatas, nilai ekspor tahun 2024 sebesar 5,6 juta U\$\$.

Perkembangan nilai ekspor Provinsi Lampung selalu berfluktuasi. Dimana nilai ekspor tertinggi terjadi pada bulan oktober dengan nilai sebesar 723,49 juta U\$\$.

Sedangkankan nilai ekspor terendah berapa pada bulan Mei dengan nilai sebesar 323.25 juta U\$\$, kemudian dibawah ini kami sajikan table perbandingan kinerja ekspor non migas Provinsi Lampung pada tahun 2023 dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3.5. Perbandingan nilai ekspor non migas tahun 2023 dan 2024

No	Bulan	Nilai Ekspor Tahun 2023 (Juta US\$)	Nilai Ekspor Tahun 2024 (Juta US\$)	Kenaikan/ Penurunan (Juta US\$)	Presentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Januari	433.96	337.94	-96.02	-22
2	Februari	297.51	434.46	136.95	46
3	Maret	458.05	391.14	-66.91	-15
4	April	316.50	331.77	15.27	4.9
5	Mei	288.09	323.25	35.16	12.2
6	Juni	392.13	447,87	55.74	14.2
7	Juli	428.91	447,17	18.26	4.26
8	Agustus	410.32	589.23	178.91	43.6
9	September	382.73	497.02	114.29	29.86
10	Oktober	437.67	723.22	285.55	65.24
11	November	429.64	495.49	65.85	15.33
12	Desember	370,31	569,76	149,45	53,86
TOTAL		4,645,82	5,588,32	942,50	20,29

Sumber data : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kinerja ekspor non migas Provinsi Lampung pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 20,3% atau sebesar 642,50 juta US\$ jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan kenaikan nilai ekspor pada tahun 2024 jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal :

- Adanya perubahan ketentuan perdagangan dan pengurangan biaya transaksi internasional.
- Adanya peningkatan kontribusi produk pada negara tujuan ekspor lampung seperti Negara Tiongkok, India dan Belanda.

Selain faktor eksternal, terdapat faktor – faktor dari dalam yang juga merupakan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam mencapai target kinerja ini, diantaranya adalah :

- Masih rendahnya informasi serta perkembangan pasar pada negara tujuan ekspor yang diperoleh para eksportir di dalam daerah.
- Masih dominannya komoditas-komoditas unggulan yang berkontribusi pada nilai ekspor Provinsi Lampung.
- Masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Provinsi Lampung.

4. Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting

Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya menjaga stabilitasi harga bahan pangan pokok penting untuk melihat laju perubahan harga rata-rata bahan pangan pokok di pasaran, dimana lokasi yang menjadi titik pantau di antaranya pasar gantung, pasar kangkung, pasar panjang, pasar tugu dan pasar way halim. Komoditi yang dominan memberikan andil dalam pembentukan inflasi bahan makanan diantaranya bawang putih, bawang merah, cabe merah dan gula,. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah andil inflasi bahan makanan. Pada tahun 2024, realisasi sasaran strategisnya adalah 0,6% sedangkan target andil inflasi berkisar $\leq 2\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini berupa:

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini bertujuan untuk menunjang perkembangan sektor perdagangan di Provinsi Lampung. Adapun kegiatan program ini yang mendukung indikator kinerja ini antara lain:

1. Pengendalian harga informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, dengan pagu

anggaran Rp.2.253.500.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.153.500.000,- dengan jumlah target indikator 12 laporan dan realisasi 12 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp.124.875.500,- (81,35%).
- b. Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 Daerah Provinsi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.2.100.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 laporan dan realisasi 1 laporan. Sub kegiatan ini mulai melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah Subsidi di 15 Kabupaten/Kota se_Provinsi Lampung, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp.2.099.619.530,- (99,98%).

Beberapa kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah Subsidi yang telah dilaksanakan :

- Kabupaten Lampung Selatan di pasar natar, tanggal 25 Januari 2024, Polda Lampung Selatan tanggal 7 Maret 2024;



- Kabupaten Mesuji di pasar rakyat simpang pematang, tanggal 5 Maret 2024 dan pekan mekar sari tanggal 5 Juni 2024;



- Kota Metro di lapangan sambar, tanggal 7 Maret 2024 dan masjid agung taqwa tanggal 10 juni 2024;



- Kabupaten Lampung Timur di way jepara, tanggal 8 Maret 2024 dan lapangan sekampung tanggal 3 Juni 2024;



- Kabupaten Lampung Tengah di Pekon adi jaya kec. Terbangi besar, tanggal 30 april 2024;



- Kabupaten Pringsewu di lapangan Pemkab. Pringsewu, tanggal 3 Mei 2024;



- Kabupaten Tanggamus di lapangan margoyoso sumber rejo, tanggal 7 Mei 2024;



- Kabupaten Way Kanan di lapangan sriwijaya kec. Baradatu, tanggal 20 mei 2024;



- Kabupaten Lampung Utara di stadion sukung kec. Kota bumi selatan, tanggal 21 Mei 2024;



- Kabupaten Lampung Selatan di desa kedondong kec. Kedondong, tanggal 27 Mei 2024;



- Kabupaten Pesisir Barat di lapangan pemda pesisir barat, tanggal 28 Mei 2024;



- Kabupaten Lampung Barat di pondok pesantren Roudlotussholihin Kec. Air Hitam, tanggal 29 Mei 2024;



- Kabupaten Tulang Bawang di lapangan kampung bawang sakti kec. Banjar agung, tanggal 30 Mei 2024;



- Kabupaten Tulang Bawang Barat di kec. Pagar dewa dan GOR kagungan ratu kec. Tulang bawang udik, tanggal 30 Mei 2024;



- Kota Bandar Lampung di lapangan saburai enggal, tanggal 7 juni 2024;



- Kegiatan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi, pada tanggal 1 september 2024 di halaman pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.



- Kegiatan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi, pada tanggal 5 september 2024 di pasar KTM Kabupaten Mesuji.



- Kegiatan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi , pada tanggal 12 september 2024 di pasar pulun kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat.



- Kegiatan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi , pada tanggal 13 september 2024 di lapangan korpri kantor gubernur Lampung.



- Kegiatan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi , pada tanggal 19 september 2024 di pelataran parkir islamic center, Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.



- Kegiatan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi pada tanggal 20 september 2024 di balai desa wates bumi ratu nuban Kabupaten Lampung Tengah.



- Kegiatan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi ,pada tanggal 24 september 2024 di balai kampung bengkulu Kecamatan labuhan Kabupaten Way Kanan.



- Kegiatan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi ,pada tanggal 26 september 2024 di Kampung panca mulia Keacamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Barat.



- Kegiatan Operasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi ,pada tanggal 27 september 2024 di balai desa Suwojajar Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara.



Pada triwulan IV tahun 2024, telah dilaksanakan operasi pasar murah di beberapa kabupaten diantaranya :

- Kabupaten Lampung Timur di Desa Brajasakti Kec. Way Jepara, pada tanggal 2 oktober 2024. di Lapangan Polsek Sekampung

Kecamatan Sekampung, pada tanggal 11 november 2024 dan di Lapangan Desa Labuhan Ratu 1, Kecamatan Way Jepara pada tanggal 10 desember 2024.



- Kabupaten Tanggamus di TPI Kota Agung Kel. Pasar Madang, pada tanggal 4 oktober 2024. Dan di Pekarangan Kantor Kecamatan Talang Padang pada tanggal 12 desember 2024.



- Kabupaten Pesisir Barat di Pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah, pada tanggal 5 oktober 2024.



- Kota Metro di Raya Punggur Imopuro, Kec. Metro Pusat, pada tanggal 22 oktober 2024. Dan Halaman Pasar Cendrawasih, Kecamatan Metro Pusat pada tanggal 5 desember 2024.



- Kabupaten Way Kanan di Lapangan Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu, pada tanggal 23 oktober 2024.



- Kabupaten Lampung Tengah di Taman Wisata Kuliner Kecamatan Punggur, pada tanggal 24 oktober 2024.



- Kabupaten Mesuji di Balai Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji pada tanggal 25 oktober 2024, di Pasar Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang pada tanggal 12 november 2024 dan di Halaman Balai Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji pada tanggal 03 desember 2024.



- Kabupaten Pesawaran di Pasar Desa Tri Rahayu Kecamatan Negeri Katon pada tanggal 28 oktober 2024, di Lapangan Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, pada tanggal 30 november 2024.



- Kabupaten Tulang Bawang di Pasar Lama (Tugu Jelabat) kecamatan Menggala, pada tanggal 29 oktober 2024.



- Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pasar Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, pada tanggal 30 oktober 2024.



- Kota Bandar Lampung di Halaman Kantor Disperindag Provinsi Lampung pada tanggal 4 desember 2024, Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung pada tanggal 13 desember 2024, dan lapangan polda lampung pada tanggal 21 desember 2024.



2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya, dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.75.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 laporan. Sub kegiatan mengalami optimalisasi anggaran sehingga belum bisa dilaksanakan pada tahun 2024.

Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan beberapa program atau kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis dan pencapaian kinerja pada sasaran renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung yaitu berupa :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 didukung oleh 7 (Tujuh) kegiatan yang terdiri dari :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp.245.415.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.174.011.000,-, jumlah target indikator 9 dokumen dengan realisasi 9 dokumen. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.172.212.878,- (98,97%).
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.71.404.000,-, jumlah target indikator 5 dokumen dengan realisasi 5 dokumen. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.71.237.500,- (99,77%).
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp.13.293.942.116,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.13.218.942.116,-, jumlah target indikator 100 orang/bulan dengan realisasi 12 bulan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.12.253.324.168,- (92,70%).
 2. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,-, jumlah target indikator 12 dokumen dengan realisasi 12 dokumen. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.24.841.700,- (99,37%).
 3. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun SKPD. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,-, jumlah target indikator 1 laporan dengan realisasi 1 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.24.762.300,- (99,05%).
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,-, jumlah target indikator 12 laporan dengan realisasi 12 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.24.792.475,- (99,17%).
- c. Administrasi BMD Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada Perangkat Daerah. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,-, jumlah target indikator 2 laporan dengan realisasi 2 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.24.906.550,- (99,63%).
 2. Penatausahaan BMD pada SKPD. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,-, jumlah target indikator 1 laporan dengan realisasi 1 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.24.844.900,- (99,38%).

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp.91.593.600,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.91.593.600,-, jumlah target indikator 50 orang dengan realisasi 35 orang. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024 anggaran yang terealisasi sebesar Rp.70.966.600,- (77,40%).
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp.691.944.097,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.35.000.000,-, jumlah target indikator 1 paket dengan realisasi 1 paket. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.34995.000,- (99,99%).
 2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.112.445.597,-, jumlah target indikator 1 paket dengan realisasi 1 paket. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.112.369.800,- (99,93%).
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,-, jumlah target indikator 1 paket dengan realisasi 1 paket. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.9.991.600,- (99,92%).
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.35.000.000,-, jumlah target indikator 1 paket dengan realisasi 1 paket. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.35.000.000,- (100%).
 5. Penyediaan Bahan/Material. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.124.000.000,-, jumlah target indikator 2 paket dengan realisasi 2 paket. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.114.837.200,- (92,61%).

6. Fasilitas Kunjungan Tamu. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,-, jumlah target indikator 20 laporan dengan realisasi 16 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.29.216.000,- (83,48%).
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.340.498.500,-, jumlah target indikator 70 laporan dengan realisasi 70 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.340.482.833,- (100%).
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran Rp.1.811.800.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.250.000.000,-, jumlah target indikator 1 laporan dengan realisasi 1 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.242.335.214,- (96,93%).
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.1.561.800.000,-, jumlah target indikator 12 laporan dengan realisasi 12 laporan. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.1.535.378.000,- (98,31%).
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran Rp.618.110.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.578.110.000,-, jumlah target indikator 12 unit dengan realisasi 12 unit. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp.570.929.710,- (98,76%).
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,- dengan jumlah target indikator 1 unit. Sub kegiatan ini mengalami

optimalisasi anggaran sehingga belum bisa dilaksanakan pada tahun 2024.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.40.000.000,-, jumlah target indikator 53 unit dengan realisasi 53 unit. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2024 . anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp.39.721.000,- (99,30%).

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2024/ IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2024.

Pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran tahun 2024 pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selama tahun 2024, dari hasil pencapaian untuk persentase pertumbuhan sektor industri pengeolahan dan sektor Perdagangan yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung masih menggunakan data triwulan III tahun 2024. Pencapaian kinerja berdasarkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya :

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024		Keterangan
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	Persen	6,3	14,2	Perindustrian
2	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	Persen	7,2	7,02	Perdagangan
3	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	3,8	5,6	Perdagangan
4	Andil inflasi bahan makanan	Persen	≤ 2	0,6	Perdagangan

Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

- a) Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk.
- b) Melambatnya pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga Provinsi Lampung yang juga tercatat melambat yang di pengaruhi oleh terbatasnya mobilitas masyarakat dan perekonomian yang belum stabil dan perekonomian global yang mengalami perlambatan.
- c) Masih dominannya komoditas-komoditas unggulan yang berkontribusi pada nilai ekspor Provinsi Lampung.
- d) Tahun 2024 ini kelompok penyumbang inflasi dengan andil terbesar berupa kelompok makanan, minuman dan tembakau. Antara lain seperti komoditas beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit, daging ayam ras, bawang putih dan rokok putih.

4.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

- a) Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan.
- b) Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha terutama Jasa Lainnya, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Perusahaan yang tumbuh cukup tinggi.
- c) Peningkatan kinerja ekspor luar negeri di Provinsi Lampung bersumber dari peningkatan volume ekspor Batubara, CPO, Lada dan Kopi. Peningkatan harga CPO Internasional mendorong kinerja ekspor lemak dan minyak hewan/nabati meningkat tajam.
- d) Kelompok makanan, minuman dan tembakau terpantau mengalami penurunan tekanan inflasi. Disisi lain, tekanan inflasi pada sub kelompok makanan masih tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti komoditas beras, telur ayam ras dan petai.

4.3. Rekomendasi Kebijakan.

Menanggapi hasil evaluasi renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2024 terhadap faktor penghambat dan factor pendorong, maka kami merekomendasikan empat hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri serta pengembangan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber daya industri.
- b) Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi pada Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor serta pengembangan sarana dan prasarana Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor dan pengembangan sumber daya Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.
- c) Meningkatkan pengetahuan eksportir, kerjasama, dan pengawasan terhadap eksportir serta mengembangkan sarana dan prasarana eksportir.
- d) Meningkatkan pengetahuan, kerjasama, dan pengawasan terhadap andil inflasi terbesar, sehingga dapat menurunkan tekanan terhadap andil inflasi serta mengembangkan sarana dan prasarana eksportir.

BAB V

PENUTUP

Hasil pelaksanaan renja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada renja tahun 2024 mengusulkan akan melaksanakan 9 Program, 19 Kegiatan dan 49 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.26.237.953.443,- (dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah mengacu kepada renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Tetapi pada perjalananya terjadi optimalisasi pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan APBD Perubahan Anggaran 2024 menjadi Rp.22.811.621.538,- (dua puluh dua miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
2. Total realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp.21.706.246.545,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 95,15% dengan sisa anggaran saat ini sebesar Rp.1.105.374.993,- (satu miliar seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
3. Mengefektifkan pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sehingga hasilnya optimal dan diharapkan target yang ditetapkan akan tercapai. Melakukan penajaman dan peningkatan kualitas pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang, dengan mengacu pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Perlunya dukungan dari pemangku kebijakan anggaran terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat menjalankan lebih banyak kegiatan yang telah diusulkan pada renja tahun selanjutnya dan dengan mudah menjalankan tugas pokok serta fungsinya secara utuh dan maksimal pada tahun 2025.